

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH  
KABUPATEN / KOTA EKS KARESIDENAN SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2012 – 2016**

**THE EFFECT OF FINANCIAL AND BALANCED FUNDS  
REGIONAL ORIGINAL INCOME ON REGIONAL SHOPPING  
DISTRICT / CITY OF EKS KARESIDENAN SURAKARTA  
2012 - 2016 BUDGET YEAR**

**Drs. P. Haryoso, MM2), Sri Kuncoro<sup>1)</sup>**

Program Studi S1- Akuntansi STIE AUB Surakarta

---

**Abstrak**

Kebijakan mengenai otonomi daerah telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam peraturan undang-undang tersebut kewenangan otonomi daerah adalah supaya daerah dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar untuk dapat mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, salah satunya dituntut untuk lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah.

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 35 kabupaten/kota yang terbagi ke dalam 6 wilayah eks karesidenan yaitu : Surakarta, Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas dan Kedu. Eks Karesidenan Surakarta terdiri dari 7 kota/kabupaten yaitu : Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Kota/Kabupaten tersebut menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap tahunnya untuk mendanai setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. APBD terdiri dari komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah dan terhadap Belanja Daerah pada Kota /Kabupaten di eks Karesidenan Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 7 daerah Kota/Kabupaten di eks Karesidenan Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2012 hingga 2016. Metode dan alat yang digunakan penelitian adalah regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah yang paling dominan adalah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah kemudian Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Kata Kunci : Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

### Abstract

The policy regarding regional autonomy has been declared by the Government of Indonesia through legislation namely Republic of Indonesia Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Republic of Indonesia Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between Central and Regional Governments. In the Act, the authority of regional autonomy is so that regions can carry out development in all fields, especially for the construction of public facilities and infrastructure. Local governments are given greater authority to be able to manage and manage their own regions, one of which is demanded to be more independent in managing regional finances.

Central Java Province which has 35 regencies / cities which are divided into 6 ex-residency areas namely: Surakarta, Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas and Kedu. Ex Surakarta Residency consists of 7 cities / regencies namely: Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen and Klaten. The City / Regency prepares the Regional Expenditure Budget every year to fund each program and activity that has been set. APBD consists of components of income, expenditure and financing. Regional Revenues consist of Local Revenue, Balancing Funds and Other Regional Revenues. Regional Expenditures consist of Direct Expenditures and Indirect Expenditures and Regional Financing consisting of financing revenues and financing expenditures. Therefore this study aims to prove empirically the effect of Balancing Funds and Regional Original Revenues and on Regional Expenditures in Cities / Districts in the former Surakarta Residency in Central Java Province.

This study used a sample of 7 cities / regencies in the former Surakarta residency of Central Java Province that were sourced from the Realization of Regional Revenues and Expenditures Reports from 2012 to 2016. The methods and tools used in this study were multiple linear regression.

The results of this study indicate that Balancing Funds, especially General Allocation Funds and Regional Original Revenues have a significant influence on regional expenditure allocations. If seen further, the most dominant level of dependence on regional expenditure allocation is the General Allocation Fund and Regional Original Revenue then Special Allocation Funds and Revenue Sharing Funds.

Keywords: Balancing Funds, Regional Original Income and Regional Expenditure

### PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri dan disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan

pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan, khususnya pengelolaan keuangan daerah.

Reformasi sektor keuangan tersebut telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi

pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak - pihak yang berkepentingan (Mardiasmo,2002). Pengamat ekonomi,

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sektor publik merupakan bagian yang mempunyai peranan vital dalam hal pengelolaan keuangan negara. Berbeda dengan sektor swasta yang bertujuan mencari laba, sektor publik lebih ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan publik. Pendanaan dalam sektor publik bersumber pada dana masyarakat, baik dari pajak atau retribusi, biaya yang dikenakan atas jasa publik, laba perusahaan milik negara, maupun sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Berlatar belakang hal tersebut, sektor publik diharapkan dapat mengelola keuangan negara dengan transparan dan mampu mewujudkan pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal.

Kontrol terhadap penggunaan dana publik wajib dilakukan. Seperti di sektor swasta, cara untuk mengontrol tersebut dilakukan salah satunya dengan menyusun anggaran. Dalam sektor publik, anggaran yang disusun bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (disingkat APBN untuk pemerintah pusat) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (disingkat APBD untuk pemerintah daerah). Anggaran tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya harus

(Mardiasmo, 2005: 18). Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Sesuai dengan teori agency, akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2005: 20) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) Kota eks Karesidenan Surakarta yaitu pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/ Kota eks Karesidenan Surakarta dan Obyek Penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat BPK RI) untuk periode 2012 s.d 2016.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003), Herman Yawa dan Treesje Runtu (2008) Akhmad Imam Amrozi (2013) dan dan Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sumber data yang berbeda bukan hanya DAU saja melainkan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel yang akan diuji pengaruhnya, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah. Kelima variabel tersebut digolongkan menjadi dua kelompok sebagai berikut :

#### 1. Variabel terikat (dependent variable).

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (Y). Total Belanja Daerah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan realisasi

disusun dengan sungguh-sungguh dan tidak semata-mata sebagai formalitas. Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009).

Dalam APBD dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pendapatan sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah (Pendapatan Asli Daerah-selanjutnya disingkat dengan PAD) dan transfer dari pusat yang disebut Dana Perimbangan (terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus).

## METODE

Penelitian berlokasi di Pemerintah Kabupaten/

laporan realisasi anggaran daerah periode 2012-2016. Total PAD adalah realisasi total PAD yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran daerah periode 2012 - 2016. Total PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan bagian laba perusahaan milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/ Kota eks Karesidenan Surakarta terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri dan Kota Surakarta. Penulis dalam penelitian mengambil seluruh populasi dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

total belanja yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran daerah periode 2012-2016. Total belanja daerah tersebut meliputi semua komponen belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

## 2. Variabel bebas (independent variabel)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif. Ada empat variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Nilai Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah realisasi yang terdapat dalam

Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana dan berganda (*multiple regression*). Regresi sederhana dilakukan tanpa *lag* maupun dengan *lag* 1 tahun sampai 3 tahun. Regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen yang ada (Dana Perimbangan dan PAD) terhadap belanja daerah secara bersama. Data diolah dengan bantuan *software* SPSS (*Statistical Product and Service Soluttion*) for Windows.

Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Kabupaten/Kota telah menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
- b. Kabupaten/Kota mencantumkan data-data mengenai PAD, DBH, DAU, DAK dan alokasi belanja daerah pada Laporan Realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini..

Kabupaten/Kota eks Karesidenan Surakarta telah menyampaikan Laporan Realisasi APBD Tahun 2012 hingga 2016 kepada situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012-2016 kepada 7 Kabupaten/Kota, sehingga diperoleh jumlah data dengan rumus:

$N = \text{jumlah daerah} \times \text{periode penelitian}$

$N = 7 \times 5 \text{ tahun} = 35$

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi entah di dalam atau luar organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti (Sekaran, 2006).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data laporan realisasi anggaran yang tercantum di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten/ Kota eks Karesidenan Surakarta yang telah diaudit BPK RI periode tahun 2012-2016. Laporan yang digunakan tersebut sebagian besar telah memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI dan telah menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota eks Karesidenan Surakarta, sehingga layak untuk dijadikan

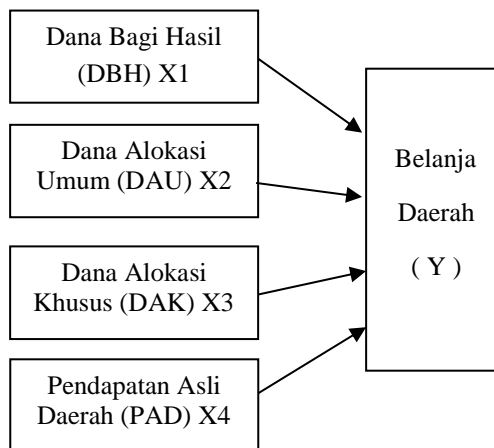
$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

**Keterangan :**

- Y = Belanja Daerah
- X1 = Dana Bagi Hasil (DBH)
- a = Konstanta
- X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)
- b1 – b4 = Koefisien Regresi
- X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
- $\varepsilon$  = error
- X4 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah memahami konsep penelitian Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (*Flypaper Effect*) di Pemerintah Kabupaten/ Kota eks Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016. Maka penulis mengemukakan kerangka konseptual dan model penelitian sebagai berikut.:



**Gambar 1.**

**Kerangka Konseptual**

Kalau asumsi ini dilanggar Data yang baik adalah data yang memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, data dikatakan berdistribusi normal apabila lebih besar daripada angka signifikansi 0,05 begitu pula sebaliknya. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut

penelitian.

**HASIL PENELITIAN**

**1. Pengujian Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas**

Uji Normalitas (Ghozali, 2006: 110) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang telah diketahui, uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal., uji statistik. menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil

Peneliti kemudian mengadakan pengolahan data mentah yang ada pada (DJPK) Kementerian Keuangan RI berupa Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit BPK RI dari 7 Kabupaten/Kota di eks Karesidenan Surakarta Data tersebut adalah total realisasi selama tahun 2012 – 2016 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

ini :

Tabel hasil pengujian normalitas menunjukkan angka signifikansi lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal

**. Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolonieritas (Ghozali, 2006: 91) bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, variabel-variabel ini tidak ortogonal.. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIFnya. Jika nilai tolerance > 0.10. atau nilai VIF < 10, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil pengujian terhadap multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Coefficients<sup>a</sup>

| Model               | Unstandardized Coefficients |                | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|                     | B                           | Std. Error     | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant)        | -186305350011               | 181712551252,7 |                           | -1,025 | ,313 |                         |       |
| Dana Bagi Hasil     | -1,039                      | 1,380          | -,043                     | -,753  | ,457 | ,818                    | 1,223 |
| Dana Alokasi Umum   | 1,631                       | ,155           | ,777                      | 10,513 | ,000 | ,493                    | 2,030 |
| Dana Alokasi Khusus | ,435                        | ,249           | ,134                      | 1,745  | ,091 | ,459                    | 2,179 |
| PAD                 | 1,480                       | ,235           | ,392                      | 6,307  | ,000 | ,695                    | 1,439 |

<sup>a</sup>. Dependent Variable: Belanja Daerah

**c. Tabel hasil pengujian multikolinieritas** menunjukkan angka tolerance DBH 0.818, DAU 0.493, DAK 0.459 dan PAD 0.695 (lebih dari 0.10) dan VIF DBH 1.223, DAU 2.030, DAK 2.179 dan PAD 1.439 (kurang dari 10). Kesimpulan yang dapat diambil dari uji multikolinieritas adalah bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen. **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi (Ghozali, 2006: 95) bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

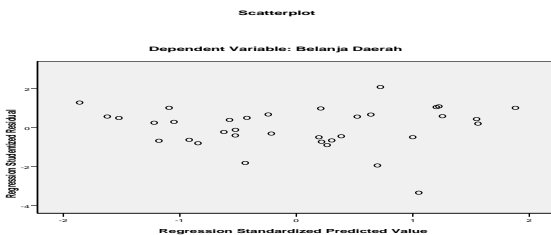
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan Runs-Test. Data dikatakan memenuhi asumsi autokorelasi jika nilainya lebih dari 0.05. Hasil pengujian terhadap autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel hasil pengujian autokorelasi dengan *Runs-Test* menunjukkan angka signifikansi lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan data bebas autokorelasi.

**d. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006: 105) bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, hal itu disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heteroskedastisitas. Hasil pengujian terjadi tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot* berikut ini :



Dari grafik *scatterplot* di atas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas serta tidak dijumpai titik-titik mengumpul di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 2. Pengujian Hipotesis

### a. Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Hasil pengujian uji t ini dihasilkan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = \beta_1 \neq 0$ , artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan skor signifikan statistik (sig) dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

Menetapkan Level of signifikan sebesar ( $\alpha$ ) = 5 % (0,050)

Kalau kita perhatikan skor Sig pada table

| Model |                     | Unstandardized Coefficients |                | Standardized Coefficients |        | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-------|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------|--------|------|-------------------------|-------|
|       |                     | B                           | Std. Error     | Beta                      |        |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant)          | -186305350011               | 181712551252,7 |                           |        | -1,025 | ,313 |                         |       |
|       | Dana Bagi Hasil     | -1,039                      | 1,380          | -,043                     | -,753  | ,457   | ,818 | ,493                    | 1,223 |
|       | Dana Alokasi Umum   | 1,631                       | ,155           | ,777                      | 10,513 | ,000   | ,493 | ,493                    | 2,030 |
|       | Dana Alokasi Khusus | ,435                        | ,249           | ,134                      | 1,745  | ,091   | ,459 | ,459                    | 2,179 |
|       | PAD                 | 1,480                       | ,235           | ,392                      | 6,307  | ,000   | ,695 | ,695                    | 1,439 |

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Hasil pengujian secara statistik menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

- Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai Sig 0,457 > 0,05 berarti DBH

- berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

- Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai Sig 0,000 < 0,05 berarti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai Sig 0,091 > 0,05 berarti berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai Sig 0,000 < 0,05 berarti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa dua variabel yang dimasukkan dalam model signifikan mempengaruhi alokasi belanja daerah. Variabel tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum

(DAU). Kedua variabel tersebut menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05.

Sedangkan dua variabel lainnya yang dimasukkan dalam model tidak signifikan mempengaruhi alokasi belanja daerah. Variabel tersebut adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kedua variabel tersebut menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,457 dan 0,091 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05.

**Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan di bawah ini:**

$$\text{Belanja Daerah} = - 186.305.350.011 - 1,039 \text{ DBH} + 1,631 \text{ DAU} + 0,435 \text{ DAK} + 1,480 \text{ PAD}$$

**Persamaan tersebut dapat di artikan:**

- Konstanta sebesar - 186.305.350.011 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan ( $X_1=0$ ,  $X_2=0$ ,  $X_3=0$  dan  $X_4=0$ ), maka belanja daerah tiap kota/kabupaten sebesar minus (-) Rp. 186.305.350.011
- Koefisien regresi DBH bertambah negatif sebesar - 1,039 artinya apabila terjadi

perubahan DBH sebesar 1% maka belanja daerah tetap mengalami kenaikan, karena penurunan variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

- Koefisien regresi DAU bertambah positif sebesar 1,631 artinya apabila terjadi perubahan variabel DAU sebesar 1% akan menaikkan belanja daerah sebesar 1,631 atau 16,31 %.
- Koefisien regresi DAK bertambah positif sebesar 0,435 artinya apabila terjadi perubahan variabel DAK sebesar 1% akan menaikkan belanja daerah hanya sebesar 0,435 atau 4,35 %, tetapi kenaikan variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
- Koefisien regresi PAD bertambah positif sebesar 1,480 artinya apabila terjadi perubahan variabel PAD sebesar 1% akan menaikkan belanja daerah hanya sebesar 1,480 atau 14,80 %.

**b. Uji F**

ANOVA<sup>a</sup>

| Model |            | Sum of Squares              | df | Mean Square                | F      | Sig.              |
|-------|------------|-----------------------------|----|----------------------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 318936186780331000000000,0  | 4  | 797340466950827000000000,0 | 85,379 | ,000 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 280163539704736300000000,00 | 30 | 9338784656824540000000,000 |        |                   |
|       | Total      | 3468525407508046000000000,0 | 34 |                            |        |                   |

a. Predictors: (Constant), PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Pengujian hipotesis secara simultan/serempak (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen. Hasil Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 = 0$ , artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik

F dengan kriteria pengujian sebagai berikut : Menetapkan Level of signifikan sebesar ( $\alpha$ ) = 5 % (0,050)

Kalau kita perhatikan skor Sig pada table hasil SPSS Tabel “Anova”

$H_0$  ditolak, Nilai Kolom sig. < level of significant ( $\alpha$ ) = 0,05, yaitu sebesar 0,000 <sup>a</sup>

berarti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

**b. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | ,959 <sup>a</sup> | ,919     | ,908              | 96637387469                | 1,700         |

a. Predictors: (Constant), PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Koefisien Determinasi R<sup>2</sup> pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012: 97). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Dalam penelitian ini nilai R<sup>2</sup> adalah sebesar 0,919 berarti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menjelaskan Belanja Daerah sebesar 91,9% sedangkan sisanya 8,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini antara lain :

a. Lain-lain pendapatan daerah yang mencakup.

- 1) Hibah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa,

termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali, Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam

- 2) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota,
- 3) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan
- 4) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

b. Penerimaan pembiayaan yang mencakup :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA),

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh DAU dan PAD pada beberapa daerah khususnya Kabupaten/Kota di eks Karesidenan Surakarta lebih kuat pengaruhnya daripada DBH dan DAK terhadap belanja daerah. Indikasi yang muncul adalah pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang besar terhadap pendanaan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dalam menyusun anggaran untuk membiayai belanjanya dan kurang mengoptimalkan potensi sumber- sumber pendanaan lain terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh DAU lebih besar daripada PAD terhadap belanja daerah. Hal ini menjadi tugas pemerintah pusat untuk mendorong kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dengan cara memanfaatkan potensi-potensi daerah, misalnya dari pajak dan retribusi yang masih bisa dioptimalkan dari berbagai bidang.. Penelitian ini juga diharapkan juga mampu mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan inovasi sistem pendapatan asli daerah dengan berbasis sistem teknologi

informasi (IT) berupa sistem perpajakan dan retribusi daerah seperti yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Surakarta melalui program e - pajak dan e - retribusi yang memberi kemudahan akses informasi dan sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber penerimaan pendapatan asli daerah juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan PAD. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif yang akan memunculkan peluang-peluang investasi dan wirausaha baru serta merangsang pertumbuhan sektor riil. Suasana yang kondusif akan sangat berpengaruh dalam menarik para investor untuk datang dan menanamkan modal di daerah tersebut.

Penelitian juga diharapkan juga mampu mendorong kepada akademisi untuk melakukan penelitian di bidang serupa dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan bukti empiris yang cukup akurat sehingga dapat memberikan kontribusi pada bidang akuntansi pemerintahan. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas variabel-variabel independen (selain DBH, DAU, DAK dan PAD) yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran daerah, yang kemungkinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

- 2) pinjaman, dan
- 3) Penerimaan piutang daerah.

### PENUTUP

#### Simpulan

1. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa DBH berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah sebesar (-) 1,039.
2. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sebesar 1,631.
3. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif tetapi

- tidak signifikan terhadap belanja daerah sebesar 0,435.
4. Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sebesar 1,480.
  5. Variabel yang dominan adalah DAU dan PAD yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mengandalkan dan bergantung paling besar pada DAU dan PAD dalam menyusun dan membiayai anggaran belanjanya.
  6. Semakin besar pengaruh DAU, semakin besar pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukry, dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi Surabaya Oktober 2003*.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Isdijoso, B dan T. Wibowo. 2002. Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah: Studi Kasus pada Sektor Pendidikan di Kabupaten/Kota eks Karesidenan Surakarta. *Kajian Ekonomi dan keuangan, Vol. 6, No. 1*.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sulistiyawan, Eko. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi*.

<http://www.bpkp.go.id>

<http://www.semarang.bpk.go.id>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>